

GENTRIFIKASI DAN AKAR-AKAR MASALAH SOSIAL: MENAKAR IDENTIFIKASI, DIAGNOSIS, DAN *TREATMENT* PROSES GENTRIFIKASI SEBAGAI MASALAH SOSIAL

Pinurba Parama Pratiyudha

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Informasi Artikel:

Diterima: 16 Mei 2019

Naskah perbaikan: 21 Juni 2019

Disetujui: 23 Juli 2019

Tersedia Online: 19 Agustus 2019

Kata Kunci:

gentrifikasi, masalah sosial, perubahan sosial perkotaan.

Korespondensi:

Pinurba Parama Pratiyudha
Universitas Gadjah Mada,
Indonesia

Email:

pppyudha@gmail.com

Abstrak: *Gentrifikasi atau perubahan kondisi demografi dan sosio spasial kawasan perkotaan, membawa munculnya pergolakan masyarakat dalam melawan proses tersebut. Transformasi pola surplus nilai di kawasan perkotaan dan keberperanan pemerintah menciptakan kawasan perkotaan yang ramah terhadap pasar menjadi alasan dari munculnya proses tersebut. Artikel ini pertama bertujuan untuk mengidentifikasi gentrifikasi sebagai bentuk dari masalah sosial yang menyebabkan perubahan rupa kondisi sosial kawasan perkotaan. Munculnya kosentrasi kapital dan kelas menengah ke dalam kota membawa pada terjadinya proses perubahan. Perubahan ini kemudian menjadikan gentrifikasi sebagai masalah sosial yang bersifat sistemik. Berangkat dari hal itu tulisan ini mengangkat diagnosis atas gentrifikasi sebagai suatu bentuk masalah sosial di kawasan perkotaan.*

Diagnosis yang dibangun memperlihatkan pula sebagai masalah sosial yang berakar dari kesalahan sistem (system blame approach). Proses gentrifikasi muncul dari pola produksi ruang yang timpang, dengan bentuk relasi produksi yang terlalu dominan oleh salah satu aktor. Berikutnya tulisan ini membahas bentuk penyelesaian masalah (treatment) dengan mendukung pada inklusifitas pembangunan sosial di ruang perkotaan. Tulisan ini berargumen bahwa hak atas kota (right to the city) sebagai solusi dalam mengatasi gentrifikasi sebagai masalah sosial.

Copyright © 2019

This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini berangkat dari keresahan global terkait permasalahan penataan kawasan di tengah kota. Berdasarkan publikasi artikel The Guardian pada bulan Maret 2018, kota Bordeaux menjadi contoh bagaimana adanya resistensi masyarakat atas kebijakan urban pemerintah kota. Masyarakat kota Bordeaux sudah jengah dengan okupasi lapangan kerja oleh penduduk non-Bordeaux dan disingkirkannya para penduduk miskin di kawasan tengah kota (The Guardian, 2018). Kota Bordeaux lambat laun mulai dikuasai oleh masyarakat Bordeaux berpenghasilan tinggi serta para pendatang dari Paris. Fenomena ini tidak lepas dari upaya pemerintah kota Bordeaux menghadirkan kawasan perkotaan yang ramah dengan pengembangan industri yang pesat. Kedatangan para pendatang merupakan cara dalam menumbuhkan industri kawasan *downtown* perkotaan. Sehingga bentuk-bentuk penyingkiran kawasan miskin dilakukan dalam upaya mewujudkan kawasan perkotaan yang ramah.

Kota Bordeaux tidaklah sendiri dalam menghadapi kasus yang serupa. Ambisi Jakarta pada tahun 2016 untuk memiliki Cheonggyecheon versi Indonesia, membawa pada bentuk upaya penyingkiran elemen-elemen yang 'tidak diinginkan' dari ruang-ruang publik di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan bentuk upaya tersebut dengan menyingkirkan mereka



yang ‘tidak diinginkan’ melalui program revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua harus steril dari para pedagang kaki lima (PKL), pengamen, dan pertunjukan jalan. Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan dirinya sebagai kota yang ramah terhadap perkembangan *co-working space* dan pasar anak muda untuk mengembangkan ruang kreatif. Sterilisasi beberapa kawasan ruang publik juga menunjang upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan mengembangkan pasar dengan memasukan pengunjung berpenghasilan menengah ke atas (The Guardian, 2016). Untuk tujuan inilah kemudian pemerintah DKI Jakarta dibantu aparat dan *bulldozer* dari tahun 2016 hingga 2017 menggalakan penggusuran kawasan-kawasan yang tidak diinginkan seperti kawasan pemukiman kumuh di bantaran sungai hingga kawasan pedagang kaki lima.

Sedari dulu perkembangan kawasan perkotaan menunjukkan tendensi penyingkiran kelompok marjinal dari ruang perkotaan. Harvey (2008) menggambarkan kondisi serupa terjadi di Paris memasuki abad ke-20 ketika pemerintah Kerajaan Perancis melakukan penggusuran pemukiman kumuh dan penataan ulang kawasan urban Paris. Arsitek dan kelompok birokrasi pemerintah kota melihat ruang kota sebagai suatu objek yang diam. Kota dilihat sebagai sesuatu yang dapat diubah dan dibentuk sesuai tujuan yang ingin dicapai (Lefebvre, 1991). Hal inilah yang kemudian berdampak pada pandangan pengembangan kawasan perkotaan yang mendekati logika-logika kapitalisme. Dalam upaya menarik investor asing serta perputaran modal manusia yang cepat, kota dunia berusaha menghadirkan diri dalam citra yang modern dan anti terhadap elemen kotor seperti perkumuhan dan kelompok masyarakat marjinal.

Kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan konsep gentrifikasi dalam pembangunan kawasan urban. Gentrifikasi dimaknai sebagai bentuk transformasi kelas sosial atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersial (Lees, Slater, & Wyly, 2007). Gentrifikasi menjadi bentuk komodikasi makna dari ruang perkotaan yang cenderung menyesuaikan kebutuhan kelas menengah atau pasar. Pergeseran penduduk kota dari kelompok kelas menengah ke bawah menjadi kelompok kelas menengah ke atas ialah hal yang kentara pada proses ini (Cocola-Gant, 2019; Sturtevant, 2014). Sehingga kemudian pemerintah kota berusaha untuk mewujudkan kawasan kota dengan kualitas hidup yang baik.

Secara positif gentrifikasi dibutuhkan dalam upaya merevitalisasi dan perbaikan kondisi perkotaan (Atkinson, 2002, 2004). Kondisi wilayah yang pada awalnya merupakan kawasan yang tidak sehat dan terkhususnya tidak ramah secara lingkungan, dapat mengalami perbaikan kualitas dengan melalui proses gentrifikasi. Namun pada sisi lain, gentrifikasi menjadi penyebab dari munculnya jurang ketimpangan dan permasalahan terkait keadilan sosial (Harvey, 2009; Smith, 2008). Pemusatan pembangunan pada kebutuhan kelompok kelas menengah menjadikan kian tersingkirkannya keberadaan kelompok marjinal dan membawa masalah ketidakadilan dalam pembentukan ruang kota itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan yang telah disebutkan, tulisan ini mengidentifikasi gentrifikasi sebagai bentuk dari masalah sosial yang menyebabkan perubahan rupa kondisi sosial kawasan perkotaan. Berlanjut dari penjelasan ini kemudian tulisan ini juga mengangkat terkait bagaimana diagnosa atas gentrifikasi sebagai suatu bentuk masalah sosial di kawasan perkotaan. Terakhir tulisan ini berusaha melihat bentuk-bentuk penanganan yang tepat, terutama dalam konteks inklusifitas pembangunan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibangun menggunakan pendekatan metode *literature review*. Jesson et.al. (2011) mengkategorikan literature review sebagai metode yang dapat berdiri sendiri. Literature review ialah metode berbasis perpustakaan atau metode di atas meja dengan melibatkan analisis sekunder atas pengetahuan yang hadir secara eksplisit. Penelitian ini mengambil pendekatan *literature review* sebagai penggambaran dari pandangan segala literatur yang berkaitan dengan gentrifikasi dan kedudukannya sebagai masalah sosial dan kemudian membangun perspektif dan perdebatan baru terkait topik tersebut. Meminjam sebagian kecil model analisis berbasis *systematic literature review*

(Hart, 1998), artikel ini membangun *litarature review* dengan berbasis pada kata kunci modal sosial dan gentrifikasi dalam database karya ilmiah yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gentrifikasi, Definisi dan Pengembangannya

Definisi gentrifikasi pada dasarnya masih dalam perdebatan, terutama dalam konteks pembangunan urban. Gentrifikasi merupakan transformasi dari kelas pekerja atau daerah kosong di tengah kota menjadi kawasan hunian kelas menengah dan/atau kawasan komersial (Gould & Lewis, 2012; Lees et al., 2007). Pada pandangan kritis, gentrifikasi dinilai sebagai fenomena masuknya kelas menengah dan kapital yang melingkupi mereka ke dalam area kelas ekonomi bawah (Smith, 1979, 1982). Pada perkembangannya gentrifikasi kemudian mendorong pada bentuk penyingkiran kawasan kumuh dan kelompok marjinal dari kawasan yang dimasuki oleh kapital dan/atau kelas menengah.

Berdasarkan tinjauan literatur yang dihimpun setidaknya terdapat beberapa terminologi gentrifikasi yang dikembangkan dengan melihat konteks kasus terhadap dinamika sosial masyarakat. Terminologi pertama ialah apa yang disebut dengan gentrifikasi hijau. Gentrifikasi hijau ialah ketika kebijakan urban yang dikuasai oleh perspektif neoliberal mendorong pada penciptaan ruang hijau baru dalam tujuan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan (Bryson, 2013; Dooling, 2009; Harvey, 1989). Menurut Doshi (2019) gentrifikasi hijau dimanifestasikan dalam bentuk pembersihan kawasan kumuh dalam tujuan kelompok kelas menengah dan kelas atas. Kelompok-kelompok ini mengharapkan pada kondisi lingkungan yang estetik dan sehat terutama melihat isu banjir dan polusi udara. Pandangan ini setidaknya diakomodasi dalam bentuk pengembangan infrastruktur hijau (Anguelovski, 2016) dan kawasan yang estetik melalui kebijakan perencanaan urban.

Mengacu pada perpektif paska kolonial, gentrifikasi yang terjadi di belahan selatan terutama di benua Asia memiliki karakteristik yang berbeda dengan model gentrifikasi pada umumnya. Gentrifikasi di beberapa negara di Asia memiliki keterkaitan yang erat dengan relasi antara masyarakat (warga negara) dengan pemerintah (Ghertner, 2011; Ley & Teo, 2013). Pertumbuhan kelas menengah terdorong bukan karena tumbuhnya neoliberalisme, namun lebih kepada transformasi sosial politik masyarakat (Chatterjee, 2004; Fernandes, 2004). Hal ini secara erat berbicara terkait kaitannya dengan keberfungsian politik kutural yang berkembang. Langgengnya pola patron klien dan relasi klientelisme (van Klinken, 2018) dalam kultur masyarakat dunia ketiga, menjadikan adanya ikatan yang unik antara pasar, negara, dengan masyarakat. Pada konteks gentrifikasi ikatan unik terbaca dalam proses gentrifikasi yang justru tidak menciptakan pertentangan kelas seperti yang dijelaskan. Namun lebih dari itu, gentrifikasi yang terjadi di negara Asia terutama, lebih mendorong pada munculnya masalah laten dan efek samping kemiskinan yang bersifat jangka panjang.

Salah satu pembahasan yang menarik dalam diskursus gentrifikasi ialah kaitannya dengan fenomena peningkatan kualitas (*upgrading*) pemukiman perkotaan. Lambert & Boddy (2002) dalam kesimpulannya melihat pembangunan pemukiman baru di kawasan tengah kota tidaklah dapat dikatakan sebagai gentrifikasi. Dengan menganalisa perkembangan yang terjadi di kota London, proses pembangunan pemukiman baru ini tidaklah memberi efek samping pada perpindahan populasi berdasarkan kelas maupun pengusuran. Namun pandangan ini mendapat penekanan pada bentuk gentrifikasi yang lebih luas daripada sekedar perpindahan atau pengusuran kelas pekerja. Gentrifikasi telah berkembang menjadi permasalahan komodifikasi ruang, polarisasi relasi kuasa, dan kedaulatan kelompok marjinal (Clark, 2005; Davidson & Lees, 2010; D Mitchell, 2003). Sehingga pada titik ini, gentrifikasi bukan hanya pada tataran kelas, namun berkembang pada relasi sosial budaya yang simbolik.

3.2 Identifikasi Gentrifikasi Sebagai Masalah Sosial

Terminologi masalah sosial biasanya diambil sebagai penggambaran kondisi sosial yang merubah dan merusak masyarakat – seperti kriminalitas, penyimpangan moral, dan sikap rasisme. Persepsi sosiologis mendefinisikan masalah sosial sebagai bentuk proses daripada suatu kondisi

(Best, 2013). Proses masalah sosial dimulai dari klaim kelompok/individu atas suatu kondisi yang dinilai sebagai masalah. Hal yang telah didefinisikan inilah kemudian haruslah dapat dipahami dan ditentukan bentuk dari penanganan yang tepat. Pada konteks ini kemudian dapat dilihat bagaimana masalah sosial pada perspektif sosiologis memiliki pendirian yang relatif. Weinberg et al (1973) dalam argumennya mengatakan bahwa masalah sosial sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan persepsi dan nilai masyarakat. Sehingga pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa masalah sosial berdiri atas sejuta makna yang bergantung pada kondisi masyarakat yang berkembang.

Terlepas sebagai fenomena yang dipersepsikan dan dikonstruksikan, masalah sosial pada sudut pandang pembangunan sosial menjadi bahan kajian yang harus dapat diurai dan diselesaikan. Setidaknya dalam Soetomo (2013) bentuk-bentuk penanganan masalah dikonsepsikan dalam tiga tahap: identifikasi, diagnosis, dan *treatment*. Tahap identifikasi ditujukan untuk membuka kesadaran dan keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat masalah sosial. Kemudian tahap diagnosis dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mempelajari latar belakang dari masalah sosial yang muncul, serta faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sementara tahap ketiga ialah upaya pemecahan yang dapat dilakukan merunut pada hasil diagnosis. Pada penjelasan berikutnya pada sub-bab ini akan berfokus pada tahap pertama yaitu identifikasi masalah sosial. Kedua tahap yang lain akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Tulisan ini berargumen bahwa gentrifikasi merupakan masalah sosial yang muncul pada level sistem. Identifikasi masalah sosial pada level sistem pada dasarnya melihat fenomena yang teridentifikasi tersebut terjadi pada level kondisi sistem masyarakat sebagai suatu kebulatan (Soetomo, 2013). Hal yang dipandang ‘sakit’ bukanlah individu namun masyarakat (atau sistem) itu sendiri. Gentrifikasi sendiri pada dasarnya ialah fenomena yang bersifat sistemik. Proses ini tercipta ketika suatu kawasan tengah kota diokupasi oleh kelas menengah-atas dan akumulasi kapital. Bentuk okupasi ini yang kemudian ditekankan sebagai dampak yang telah terpola dalam suatu sistem pertumbuhan kawasan urban. Bentuk sistem ini mewujudkan nyata ketika aliran akumulasi kapital yang masuk di suatu kawasan mendorong pada kebijakan pembangunan yang berdasarkan kepentingan kapital. Hal ini yang kemudian oleh Smith (1982, 2008) membentuk sistem *jangkat-jungkit* pembangunan tidak berimbang (*uneven development*) yang kemudian termanifestasikan secara nyata dalam bentuk gentrifikasi. Identifikasi gentrifikasi sebagai masalah yang bersifat sistem semakin nyata dalam keterlibatan kelompok masyarakat yang lintas kelas, aktor pemerintah, serta pelaku pasar (Aufseeser, 2014; Kyung, 2011; Reese, Deverteuil, & Thach, 2010) yang turut melanggengkan proses gentrifikasi.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam mendalami gentrifikasi sebagai masalah sosial tidaklah dapat dilihat menggunakan tata ukuran tertentu. Pembentukan prasyarat suatu masalah sosial untuk dilihat secara objektif maupun subjektif (Soetomo, 2013), bagi penulis akan sangat susah untuk mengidentifikasi akarnya bilamana permasalahan sosial yang muncul cenderung terjadi pada level yang luas dan abstrak. Untuk dilihat menggunakan ukuran objektif, pola gentrifikasi secara umum berbeda-beda di setiap kawasan urban. Salah satu contoh yang nampak ialah perbedaan pola gentrifikasi antara daerah belahan dunia utara dengan belahan dunia selatan (Ghertner, 2011, 2014). Sementara secara subyektif pada dasarnya masih cukup rancu untuk disimpulkan secara umum oleh karena tidak terlepas dengan hegemoni perspektif kapitalisme dan sentralisme dari pembangunan kawasan perkotaan ke dalam setiap sistem sosial masyarakat (Lee, 2012; Loopmans, 2008; Sanders-McDonagh, Peyrefitte, & Ryalls, 2016). Keterbatasan bentuk ukuran tersebut membawa pada terlacaknya relasi masalah sosial hingga pada akar-akar relasi kuasa. Untuk melihat lebih dalam penulis kemudian membangun bentuk analisis identifikasi masalah sosial dengan memdukan dengan konteks relasi kuasa. Secara rinci kemudian dibagi dalam bentuk dua identifikasi utama.

Identifikasi pertama ialah dilihat dari gentrifikasi sebagai bentuk pembangunan kota yang menyingkirkan kelompok marjinal. Proses masuknya kelompok kelas menengah ke atas dan akumulasi modal memberi dampak pada naiknya harga jual dan sewa lahan di suatu kawasan (Hochstenbach & Musterd, 2016; Ortega, 2016; Smith, 1982). Permasalahan naiknya harga jual dan

sewa lahan memberi dampak pada semakin sedikitnya kelas sosial ekonomi menengah ke bawah untuk mengakses lahan di kawasan tengah kota. Ketidakmampuan daya sewa dan beli atas lahan juga mendorong kelompok ekonomi bawah yang sudah harus tersingkir cepat atau lambat (Fransham, 2019; Gorczynska, 2018; Marcuse, 2016). Kelas ekonomi bawah akan mengalami suatu proses berat untuk memenuhi kebutuhan lahan dan kehidupannya oleh karena naiknya standar hidup.

Identifikasi kedua yaitu dengan melihat gentrifikasi sebagai suatu masalah hegemoni dari pemikiran kapitalisme dan sentralisme kebijakan. Pada konteks ini gentrifikasi telah melekatkan dirinya sebagai bentuk fenomena yang positif. Pemerintah kota bersama aktor privat dan beberapa kelompok kelas menengah ke atas mengendepankan gentrifikasi sebagai upaya perbaikan ruang kota (Aufseeser, 2014; Wu, Edensor, & Cheng, 2018). Gambaran model kota bersih dan modern lahir dari konstruksi kelas menengah ke atas terkait kota ideal (Chaskin & Joseph, 2013; Ghertner, 2011; Parizeau, 2017). Kelompok kelas menengah ke bawah yang menduduki kawasan yang dianggap memiliki surplus nilai tinggi serta kawasan yang dianggap perlu dihijaukan (Anguelovski, Connolly, & Brand, 2018; Anguelovski, Irazábal-Zurita, & Connolly, 2019; Dooling, 2009; Doshi, 2019), diminta untuk menyingkirkan diri demi pada kepentingan bersama. Konstruksi demikian menjadi masalah karena secara tak langsung membangun pola pikir untuk mengamini adanya ketimpangan dan kemudian diteruskan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

3.3 Diagnosis Masalah Sosial dalam Proses Gentrifikasi

Paska pengidentifikasi suatu masalah sosial maka tahap selanjutnya ialah melakukan diagnosis proses dari masalah sosial. Keberadaan tahap diagnosis ini menjadi acuan dalam memunculkan rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment*) yang berkesesuaian dengan kondisi yang berkembang. (Soetomo, 2013). Pada upaya diagnosis suatu masalah sosial setidaknya terdapat dua pendekatan: berbasis pada kesalahan individu (*person blame approach*) dan pada kesalahan sistem (*system blame approach*) (Elitzen, 1986). Pendekatan yang berbasis pada kesalahan individu melihat individu sebagai sumber masalah dan menjadikan individu tersebut sebagai unit diagnosis dari masalah sosial. Sementara itu pendekatan yang berbasis pada kesalahan individu menggambarkan sumber masalah dan unit diagnosis nya ialah pada level sistem. Pada sub-bab ini diagnosis masalah sosial gentrifikasi di kawasan urban dilihat dari level sistem.

Secara garis besar penulis berargumen bahwa proses gentrifikasi berakar pada proses produksi ruang perkotaan yang timpang. Produksi ruang merupakan wujud dari praktik spasial yang hadir dari pemaknaan atas lingkungan melalui jaringan yang menghubungkan dengan aktivitas sosial dan penggunaan waktu (Lefebvre, 1991). Pada proses produksi ruang, relasi proses ini dilihat sebagai bentuk yang bersifat dialektis antara ruang yang dipraktikkan, ruang yang dikonsepsikan, dan ruang yang dipersepsikan. Ketiga proses ini dibahasakan oleh Lefebvre sebagai tiga konseptual dari produksi atas ruang sosial. Setiap proses tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan saling terkait dalam pemahaman reproduksi perkembangan perkotaan. Ruang yang dipraktikkan (*spatial practices*) mengacu pada hubungan spasial antara objek dan *ouvre* (produk ruang). Dalam pengertian ini ruang dimaknai sebagai ruang yang hidup (*lived space*) yang hadir dari proses kohesi sosial. Sementara itu representasi ruang (*representations of space*) merupakan bentuk produksi atas ruang dalam bentuk simbol dan kode yang dibangun dari satu sudut tertentu. Mudah-mudahan, ruang dikonsepsikan (*conceived space*) dari konstruksi orang atau beberapa orang pada umumnya. Terakhir, ruang representasional (*representational space*) hadir dari pemaknaan simbol yang hidup dalam ruang tersebut. Hal ini berkaitan secara khusus dengan ruang yang dipersepsikan (*perceived space*) oleh individu dan/atau kelompok yang hidup nyata dalam ruang.

Gentrifikasi digambarkan hadir sebagai akibat ketika proses produksi ruang berlangsung secara timpang. Dalam perspektif kajian perkotaan ranah bentuk representasi ruang merupakan arena di mana arsitek dan perencana kota merumuskan bentuk kota yang ideal (Harvey, 2009; Lefebvre, 1991; Don Mitchell, 1995). Posisi ini menjadi akar masalah ketika keberperanan para arsitek bersama aktor kebijakan sangat kuat untuk mempersepsikan definisi dari ruang kota. Sudah barang tentu kemudian di sini para arsitek terlalu dijejali makna perkotaan berdasarkan perspektif teknokratis dan kapitalis (Faulconbridge & McNeil, 2010; He, 2010; Scott, 1999). Penyingkiran

elemen-elemen yang dinilai merusak pemandangan serta tidak memiliki nilai akumulasi yang tinggi merupakan suatu keharusan bagi kedua perspektif ini. Keberadaan kawasan kumuh, para gelandangan, hingga kelompok marjinal tak diinginkan sebisa mungkin tidak boleh memasuki suatu ruang. Ruang dimaknai sebagai fungsi yang sudah dirumuskan bersama dalam keilmuan arsitek dan kebutuhan kota layak yang berorientasi pasar. Dari sinilah kemudian proses gentrifikasi terjadi dengan mengupayakan kawasan tengah kota yang ramah kepada kelompok menengah ke atas dan penanam modal.

Besarnya peran pemaknaan ruang oleh kelompok arsitek, aktor kebijakan, dan kelompok kapital memberi tempat bagi eksploitasi peran produksi ruang. Peran dari kelompok masyarakat yang tinggal dalam ruang tersebut untuk mendefinisikan makna dari ruang menjadi terbatas. Hal ini terwujud pada bentuk produksi ruang representasional yang tidak utuh (Brenner, 2000; Soja, 2010; Watkins, 2005). Ruang justru semata hanya dikonsepsikan dari meja kebijakan dan gambar-gambar arsitek tata ruang. Lebih dari itu hal ini memberi kemudahan bagi aktor pasar dalam mengintervensi pembentukan ruang. Hal ini kian menjadi ironi ketika aktor yang mengkonsepkan ruang ini bukanlah mereka yang secara nyata hidup dalam ruang itu (Lefebvre, 1991, 2000, 2003). Sehingga secara mudah dapat dikatakan bahwa peran masyarakat dalam turut mendefinisikan ruang kota secara halus dihilangkan perkotaan (Purcell, 1997; Ye, Chen, Duan, & Yang, 2017). Penulis kemudian melihat bahwa ketimpangan ini yang kemudian melanggengkan proses gentrifikasi ruang. Peran masyarakat menengah ke bawah yang terbatas menjadikan proses pembentukan ruang hanya berlangsung satu arah.

Perspektif pembangunan kawasan perkotaan turut melanggengkan proses gentrifikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perspektif arsitek dan aktor kebijakan cenderung mendekati pola pikir teknokratis dan kapitalis. Sehingga tujuan pembangunan ruang kota akhirnya lebih diarahkan pada pola yang bersifat elitis (top-down) dan berorientasi pada pengakumulasian modal kapital (Cassiers & Kesteloot, 2012; Harvey, 1985; Ley & Teo, 2013; Lopez-Morales, 2015). Walaupun ditengah maraknya perspektif kolaboratif dalam pembangunan kota, logika teknokratis dan kapitalis tidak dapat dielakan dan justru dilanggengkan secara kuat dalam perspektif tersebut. Hal ini semakin nampak di negara belahan selatan dalam bentuk relasi kuasa pemerintah dengan masyarakat. Kekuatan relasi pemerintah dengan masyarakat yang hierarkis menciptakan bentuk-bentuk gentrifikasi 'sukarela' dari masyarakat (Arkaraprasertkul, 2018; Shin, 2016; Waley, 2016). Pada akhirnya di sini kemudian masyarakat ekonomi menengah ke bawah cenderung akhirnya menerima proses gentrifikasi dan penggusuran dikarenakan kurangnya kesadaran yang tinggi atas peran produksi ruang.

Ketimpangan produksi ruang juga membangun hegemoni perspektif kelas menengah di kawasan urban terkait konsep kota ideal. Pendekatan pembangunan kota yang terkonsepkan oleh pendekatan kapitalisme dan neoliberalisme (He, 2010; Wang, 2011) mendorong pada wacana-wacana kota ideal kepada kelompok kelas menengah. Sebagai kelas yang berpendidikan sekaligus memiliki kestabilan ekonomi yang lebih baik, kelas menengah ini ditakdirkan tumbuh pada logika individualistik (María Luisa, 2008). Sehingga kepentingan kelas ini hanyalah pada kebutuhan individunya dan budaya konsumsi. Kedua hal ini juga mendorong terbentuknya pandangan kelas menengah akan kota estetik (Ghertner, 2015; Harvey, 2008; Pow, 2009). Kota yang ideal ialah kota dengan taman yang asri, sistem transportasi yang terintegrasi, serta kota dengan fasilitas yang modern. Dari titik inilah kemudian kelas menengah membangun sistem yang diskriminatif melalui opini-opini publik dalam upaya penyingkiran kelompok dan elemen urban yang dianggap merusak definisi kota ideal.

3.4 Hak atas Kota, Treatment Masalah Sosial, dan Kota Inklusif

Upaya penanganan (*treatment*) masalah sosial pada dasarnya ialah wujud pada usaha untuk meminimalisir berkembangnya masalah sosial. Sebab sudah sejatinya proses penanganan masalah sosial tidak dapat berlangsung secara ideal (Soetomo, 2013). Proses *treatment* dari masalah sosial setidaknya mencakup pada konteks yang luas. Setidaknya terdapat tiga usaha penanganan masalah sosial: usaha rehabilitatif, preventif, dan developmental. Pada konteks permasalahan gentrifikasi, penulis tidak secara umum menggunakan perspektif tersebut. Berdasarkan argumen yang dibangun

sebelumnya digambarkan bawah gentrifikasi sendiri merupakan produk dari ketimpangan produksi ruang. Ketimpangan produksi ruang inilah yang kemudian dapat dijawab dengan membangun konsepsi baru dalam relasi kuasa aras ruang. Mengacu pada pendapat Lefebvre (2000) dan Harvey (2012), penulis berargumen bahwa permasalahan gentrifikasi hanya dapat diselesaikan melalui penguatan hak atas kota (*right to the city*) masyarakat urban.

Henri Lefebvre (2000) dalam tulisannya "*Le droit a la ville*" mengatakan bahwa kota adalah ruang dari lahirnya *cry and demand* dalam konteks hak kemanusiaan untuk membentuk, merubah, dan memperbarui kehidupan urban. Hak atas kota hadir sebagai bentuk bagaimana kota membutuhkan suatu bentuk revolusioner atas ketimpangan proses produksi ruang (Lefebvre, 2003). Sementara itu Harvey (2012) mengembangkan konsepsi hak atas kota sebagai kekuatan kolektif untuk merubah dan mendesain penataan kota. Penataan perkotaan merupakan wujud kekuatan kolektif tersebut mampu mengatur proses urbanisasi baik secara fundamental maupun radikal (Mathivet, 2010; Njoh, 2017). Proses mendapatkan kekuatan tersebut merupakan bentuk bagaimana masyarakat mampu mengklaim kota mereka. Sehingga kemudian hak atas kota bagi Harvey merupakan bentuk kemampuan partisipasi kolektif masyarakat untuk merubah kota mereka.

Salah satu faktor kunci dalam semangat hak atas kota ialah penguatan advokasi kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Mereka yang sudah tersingkir dalam ruang kota ialah mereka yang terpinggirkan dalam partisipasinya untuk membentuk ruang kota (D Mitchell, 2003; Don Mitchell, 1995). Proses ini kemudian didukung dengan mendirikan jaringan-jaringan relawan yang berfungsi dalam menguatkan basis suara mereka yang terpinggirkan. Membangun slogan-slogan terkait keberadaan kota yang inklusif, kota yang humanis, serta kota yang kosmopolis ialah salah satu cara rehabilitasi (Leontidou, 2010; Mayer, 2010; Sandercock, 2006). Dengan menguatkan jaringan sosial dan proses kampanye, secara lambat tapi pasti wacana hak atas kota akan menjadi kekuatan hegemoni. Hal ini kemudian memberi tekanan kepada aktor pemerintah, pasar, hingga kelompok masyarakat secara luas untuk melihat dan menengok permasalahan yang ditimbulkan dari gentrifikasi. Pada saat yang bersamaan pula juga diperlukan penanganan sementara kepada kelompok marginal yang tersingkir dalam bentuk tempat berlindung sementara dan bantuan kemanusiaan.

Bentuk penanganan masalah lainnya ialah dengan penguatan hak partisipasi setiap warga kota. Hak partisipasi dalam konteks hak atas kota berdasarkan penelitian Sorensen dan Sagaris (2010) memiliki tiga karakteristik yang perlu ditinjau. Pertama, untuk mejalankan hak ini, diperlukannya pengorganisasian secara kolektif untuk mendefinisikan hak dengan mengacu pada keseharian kehidupan masyarakat. Pendefinisian hak ini secara ideal dapat terbentuk melalui keputusan kolektif yang deliberatif. Kedua dalam bentuk partisipasi yang dilakukan tidak akan terlepas dengan konteks hak-hak lainnya. Pendek kata dalam hak atas kota terkandung sekumpulan hak yang saling berhubungan satu dengan lain dan menyesuaikan pada konteks kelokalan. Karakter yang ketiga yaitu tanpa adanya perbedaan dan bentuk kolektivitas, tidak akan tercipta upaya advokasi yang kuat. Sehingga secara umum partisipasi dalam konteks hak atas kota tercipta secara maksimal ketika kekuatan komunitas dapat bekerja secara mandiri. Melalui ketiga pendekatan ini proses preventif dan developmental tercapai dengan memberi penguatan aspek partisipasi masyarakat.

Bentuk penanganan melalui upaya promosi hak atas kota merupakan wujud dari penciptaan kota yang inklusif secara sosial. Gentrifikasi secara langsung dan tidak langsung membentuk kawasan perkotaan yang cenderung eksklusif. Kasus di Amerika menggambarkan bagaimana gentrifikasi kelas ekonomi yang hadir membentuk masyarakat yang eksklusif dengan menolak kelompok tertentu untuk masuk ke pemukiman mereka (Lopez-Morales, 2016; Shaw & Sullivan, 2011). Hak atas kota pada dasarnya adalah gambaran Lefebvre dalam mewujudkan kota yang inklusif. Setiap warga negara di dalam kota itu memiliki hak untuk membentuk dan berkehidupan di dalam ruang kota secara layak. Tidak ada diskriminasi dan bentuk-bentuk relasi ketidakadilan yang dihadirkan dalam ruang kota (Harvey, 2009; Lefebvre, 2003; McCann, 2002; Purcell, 2003, 2014). Lebih jauh lagi penguatan peran hak atas kota di dalam masyarakat kota memberi dorongan dalam mempromosikan suatu kota yang berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini pertama berargumen bahwa gentrifikasi diidentifikasi sebagai masalah sosial dengan unit pada level sistem. Gentrifikasi secara umum didefinisikan sebagai transformasi dari kelas pekerja atau daerah kosong di tengah kota menjadi kawasan hunian kelas menengah dan/atau kawasan komersial dengan masuknya modal dan kelas menengah atas. Identifikasi pertama ialah keberadaan gentrifikasi sebagai gambaran dari pembangunan kota yang menyingkirkan kelompok marjinal. Identifikasi kedua yaitu dengan melihat gentrifikasi sebagai suatu masalah hegemoni dari pemikiran kapitalisme dan sentralisme kebijakan. Gentrifikasi telah menjadi semacam konstruksi yang diterima oleh pengemban kebijakan dan masyarakat. Hal ini berujung pada pemakluman dari proses gentrifikasi.

Argumen selanjutnya dari tulisan ini bahwa pada dasarnya gentrifikasi didiagnosis sebagai suatu masalah sosial dengan melihatnya dalam sudut pandang sistem. Proses gentrifikasi pada dasarnya hadir dari keberadaan sistem produksi ruang yang timpang. Ketimpangan ini terasa kentara ketika keberperanan para arsitek bersama aktor kebijakan sangat kuat untuk mempersepsikan definisi dari ruang kota. Hal ini memberi peluang kepada pasar untuk turut mengintervensi dalam pendefinisian ruang sosial perkotaan. Peran dari kelompok masyarakat yang tinggal dalam ruang tersebut untuk mendefinisikan makna dari ruang menjadi terbatas dan tidak bisa terepresentasikan secara baik. Ketimpangan produksi ruang juga membangun hegemoni perspektif kelas menengah di kawasan urban terkait konsep kota ideal. Kota ideal yang dikonsepsikan dalam bentuk kota yang tertata, bersih, dan modern kemudian mendorong hadirnya wacana publik yang kian melanggengkan proses gentrifikasi.

Terakhir, tulisan ini mengacu pada argumen Lefebvre (2000) dan Harvey (2012) hanya dapat diselesaikan melalui penguatan hak atas kota (*right to the city*) masyarakat urban. Penanganan melalui hak atas kota ini mencakup ada usaha penguatan advokasi kepada masyarakat yang tersingkir oleh karena gentrifikasi dan pemberdayaan hak partisipasi kepada setiap warga kota, terutama mereka yang termarjinalkan. Gentrifikasi secara langsung dan tidak langsung membentuk kawasan perkotaan yang cenderung eksklusif. Hak atas kota pada dasarnya adalah gambaran Lefebvre dalam mewujudkan kota yang inklusif. Setiap warga negara di dalam kota itu memiliki hak untuk membentuk dan berkehidupan di dalam ruang kota secara layak.

5. REFERENSI

- Anguelovski, I. (2016). From Toxic Sites to Parks as (Green) LULUs? New Challenges of Inequity, Privilege, Gentrification, and Exclusion for Urban Environmental Justice. *Journal of Planning Literature*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/0885412215610491>
- Anguelovski, I., Connolly, J., & Brand, A. L. (2018). From landscapes of utopia to the margins of the green urban life. *City*, 22(3), 417–436. <https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126>
- Anguelovski, I., Irazábal-Zurita, C., & Connolly, J. J. T. (2019). Grabbed Urban Landscapes: Socio-spatial Tensions in Green Infrastructure Planning in Medellín. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(1), 133–156. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12725>
- Arkaraprasertkul, N. (2018). Gentrification and its contentment: An anthropological perspective on housing, heritage and urban social change in Shanghai. *Urban Studies*, 55(7), 1561–1578. <https://doi.org/10.1177/0042098016684313>
- Atkinson, R. (2002). Does Gentrification Help or Harm Urban Neighbourhoods? An Assessment of the Evidence-Base in the Context of the New Urban Agenda (CNR Paper 5).
- Atkinson, R. (2004). The evidence on the impact of gentrification: new lessons for the urban renaissance? *International Journal of Housing Policy*, 4(1), 107–131. <https://doi.org/10.1080/1461671042000215479>
- Aufseeser, D. (2014). “Protecting” street children? Urban revitalization and regulation in Lima, Peru. *Urban Geography*, 35(6), 870–888. <https://doi.org/10.1080/02723638.2014.930573>
- Best, J. (2013). *Social problems*. New York: Norton.

- Brenner, N. (2000). The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale. *International Journal of Urban and Regional Research*, 24(2), 361–378.
- Bryson, J. (2013). The Nature of Gentrification. *Geography Compass*, 7/8, 578–587. <https://doi.org/10.1111/gec3.12056>
- Cassiers, T., & Kesteloot, C. (2012). Socio-spatial Inequalities and Social Cohesion in European Cities. *Urban Studies*, 49(9), 1909–1924. <https://doi.org/10.1177%2F0042098012444888>
- Chaskin, R. J., & Joseph, M. L. (2013). ‘Positive’ Gentrification, Social Control and the ‘Right to the City’ in Mixed-Income Communities: Uses and Expectations of Space and Place. *International Journal of Urban and Regional Research*, 37(2), 480–502. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01158.x>
- Chatterjee, P. (2004). *The politics of the governed: reflections on popular politics in most of the world*. New York: Columbia University Press.
- Clark, E. (2005). The order and simplicity of gentrification – a political challenge. In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), *Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism* (pp. 256–264). London: Routledge.
- Cocola-Gant, A. (2019). Gentrification and displacement: urban inequality in cities of late capitalism. In T. Schwanen & R. van Kempen (Eds.), *Handbook of Urban Geography*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Davidson, M., & Lees, L. (2010). New-Build Gentrification: Its Histories, Trajectories, and Critical Geographies. *Population, Space, and Place*, 16, 395–411. <https://doi.org/10.1002/psp.584>
- Dooling, S. (2009). Ecological Gentrification: A Research Agenda Exploring Justice in the City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(3), 621–639. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00860.x>
- Doshi, S. (2019). Greening Displacements, Displacing Green: Environmental Subjectivity, Slum Clearance, and the Embodied Political Ecologies of Dispossession in Mumbai. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(1), 112–132. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12699>
- Elitzen, S. D. (1986). *Social Problems*. London: Allyn and Bacon Inc.
- Faulconbridge, J., & McNeil, D. (2010). Geographies of space design. *Environment and Planning A*, 42, 2820–2823. doi:10.1068/a43420
- Fernandes, L. (2004). The politics of forgetting: class politics, state power and the restructuring of urban space in India. *Urban Studies*, 41(12), 2415–2430. <https://doi.org/10.1080%2F00420980412331297609>
- Fransham, M. (2019). Increasing evenness in the neighbourhood distribution of income poverty in England 2005–2014: Age differences and the influence of private rented housing. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 51(2), 403–419. <https://doi.org/10.1177%2F0308518X18792569>
- Ghertner, D. A. (2011). Gentrifying the State, Gentrifying Participation: Elite Governance Programs in Delhi. *International Journal of Urban and Regional Research*, 35(3), 504–532. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01043.x>
- Ghertner, D. A. (2014). India’s urban revolution: geographies of displacement beyond gentrification. *Environment and Planning A*, 46, 1554–1571.
- Ghertner, D. A. (2015). *Rule by Aesthetics: World-class City Making in Delhi*. Oxford: Oxford University Press.
- Gorczyńska, M. (2018). Mechanisms of property ownership change and social change in inner-city Warsaw (Poland). *Urban Studies*, 55(13), 2803–2820.

- Gould, K. A., & Lewis, T. L. (2012). The Environmental Injustice of Green Gentrification: The Case of Brooklyn's Prospect Park. In J. N. DeSena & T. Shortell (Eds.), *The World in Brooklyn: Gentrification, Immigration, and Ethnic Politics in a Global City* (pp. 113–146). Lanham: Lexington Books.
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: SAGE Publication Ltd.
- Harvey, D. (1985). *The Urbanisation of Capital*. Oxford: Blackwell.
- Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban politics in late capitalism. *Geografiska Annaler*, B71, 3–17.
- Harvey, D. (2008). The Right to the City. *New Left Review*, 53(53), 23–40. <https://doi.org/10.1080/13604819608713449>
- Harvey, D. (2009). *Social Justice and the City*. Athens: The University of Georgia Press.
- Harvey, D. (2012). *Rebel Cities : From The Right to The City to The Urban Revolution*. London: Verso.
- He, S. (2010). New-Build Gentrification in Central Shanghai: Demographic Changes and Socioeconomic Implications. *Population, Space, and Place*, 16, 345–361. <https://doi.org/10.1002/psp.548>
- Hochstenbach, C., & Musterd, S. (2016). Changing urban geographies through boom and bust periods: gentrification and the suburbanization of poverty (CUS Working Paper Series No. 17). Amsterdam.
- Jesson, J. K., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Review*. Los Angeles: SAGE Publication Ltd.
- Kyung, S. (2011). 'State-facilitated Gentrification' in Seoul, South Korea: for Whom, by Whom and with What Result?
- Lambert, C., & Boddy, M. (2002). *Transforming the City: PostRecession Gentrification and Re-Urbanisation (Research Paper 6)*.
- Lee, E. W. (2012). The New Public Management reform of state-funded social service nonprofit organizations and the changing politics of welfare in Hong Kong. *International Review of Administrative Sciences*, 78(3), 537–553. <https://doi.org/10.1177%2F0020852312444855>
- Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (2007). *Gentrification*. New York & London: Routledge.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Basil Blackwood Ltd.
- Lefebvre, H. (2000). *Writing Cities*. Oxford: Basil Blackwood Ltd.
- Lefebvre, H. (2003). *The Urban Revolution*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Leontidou, L. (2010). Urban Social Movements in "Weak" Civil Societies: The Right to the City and Cosmopolitan Activism in Southern Europe. *Urban Studies*, 47(6), 1179–1203. <https://doi.org/10.1177%2F0042098009360239>
- Ley, D., & Teo, S. Y. (2013). Gentrification in Hong Kong Epistemology vs. Ontology. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(4), 1286–1303. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12109>
- Loopmans, M. (2008). Relevance, Gentrification and the Development of a New Hegemony on Urban Policies in Antwerp, Belgium. *Urban Studies*, 45(12), 2499–2519. <https://doi.org/10.1177%2F0042098008097107>
- Lopez-Morales, E. (2015). Gentrification in the global South. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action*, 19(4), 564–573.
- Lopez-Morales, E. (2016). Gentrification in Santiago, Chile: a property-led process of dispossession and exclusion. *Urban Geography*, 37(8), 1109–1131. <https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1149311>

- Marcuse, P. (2016). Gentrification, Social Justice and Personal Ethics. *International Journal of Urban and Regional Research*, 39(6), 1263–1269. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12319>
- María Luisa, M. L. (2008). Middle class identities in a neoliberal age: tensions between contested authenticities. *The Sociological Review*, 56(2), 220–237. <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-954X.2008.00785.x>
- Mathivet, C. (2010). The Right to the City : Keys to Understanding the Proposal for “Another City is Possible.” In A. Sugranyes & C. Mathivet (Eds.), *Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City* (pp. 21–26). Santiago: Habitat International Coalition.
- Mayer, M. (2010). The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action*, 13(2–3), 362–374. <https://doi.org/10.1080/13604810902982755>
- McCann, E. J. (2002). Space, citizenship, and the right to the city: A brief overview. *GeoJournal*, 58(2/3), 77–79. <https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000010826.75561.c0>
- Mitchell, D. (2003). *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*. New York: Guilford Publications. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Lp3184WKBYAC>
- Mitchell, Don. (1995). The End of Public Space? People’s Park, Definitions of the Public, and Democracy. *Annals of the Association of American Geographers*, 85(1), 108–133.
- Njoh, A. J. (2017). “The Right-To-The-City Question” and Indigenous Urban Populations in Capital Cities in Cameroon. *Journal of Asian and African Studies*, 52(2), 188–200. <https://doi.org/10.1177/0021909615570954>
- Ortega, A. A. C. (2016). Manila’s metropolitan landscape of gentrification: Global urban development, accumulation by dispossession & neoliberal warfare against informality. *Geoforum*, 70, 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.02.002>
- Parizeau, K. (2017). Witnessing urban change: Insights from informal recyclers in Vancouver, BC. *Urban Studies*, 54(8), 1921–1937. <https://doi.org/10.1177%2F0042098016639010>
- Pow, C.-P. (2009). Neoliberalism and the Aestheticization of New Middle-Class Landscapes. *Antipode*, 41(2), 371–390. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2009.00677.x>
- Purcell, M. (1997). Ruling Los Angeles: Neighborhood Movement, Urban Regimes, and The Production of Space in Southern California. *Urban Geography*, 18(8), 684–704. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.18.8.684>
- Purcell, M. (2003). Citizenship and the right to the global city: Reimagining the capitalist world order. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(3), 564–590. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.00467>
- Purcell, M. (2014). Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. *Journal of Urban Affairs*, 36(1), 141–154. <https://doi.org/10.1111/juaf.12034>
- Reese, E., Deverteuil, G., & Thach, L. (2010). ‘Weak-Center’ Gentrification and the Contradictions of Containment: Deconcentrating Poverty in Downtown Los Angeles. *International Journal of Urban and Regional Research*, 34(2), 310–327. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.00900.x>
- Sandercock, L. (2006). Cosmopolitan urbanism: a love song to our mongrel cities. In J. Binnie, J. Holloway, S. Milington, & C. Young (Eds.), *Cosmopolitan Urbanism* (pp. 37–52). New York: Routledge.
- Sanders-McDonagh, E., Peyrefitte, M., & Ryalls, M. (2016). Sanitising the City: Exploring Hegemonic Gentrification in London’s Soho. *Sociological Research Online*, 21(3), 1–6. <https://doi.org/10.5153%2Fsro.4004>
- Scott, J. (1999). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven and London: Yale University Press. <https://doi.org/10.1093/biomet/85.2.427>

- Shaw, S., & Sullivan, D. M. (2011). "White Night": Gentrification, Racial Exclusion, and Perceptions and Participation in the Arts. *City & Community*, 10(3), 241–264. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6040.2011.01373.x>
- Shin, H. B. (2016). Economic transition and speculative urbanisation in China: Gentrification versus dispossession. *Urban Studies*, 53(3), 471–489. <https://doi.org/10.1177%2F0042098015597111>
- Smith, N. (1979). Toward a Theory of Gentrification A Back to the City Movement by Capital, not People Neil Smith. *Journal of the American Planning Association*, 45(4), 538–548. <https://doi.org/10.1080/01944367908977002>
- Smith, N. (1982). Gentrification and Uneven Development. *Economic Geography*, 58(2), 139–155.
- Smith, N. (2008). *Uneven Development: Natural, Capital, and the Production of Space*. Athens: The University of Georgia Press.
- Soetomo. (2013). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Sorensen, A., & Sagaris, L. (2010). From participation to the right to the city: Democratic place management at the neighbourhood scale in comparative perspective. *Planning Practice and Research*, 25(3), 297–316. <https://doi.org/10.1080/02697459.2010.503424>
- Sturtevant, L. (2014). The New District of Colombia: What Population Growth and Demographic Cnage Mean for the City. *Journal of Urban Affairs*, 36(2), 276–299. <https://doi.org/10.1111/juaf.12035>
- The Guardian. (2016). "Get off the square!": The unsubtle gentrification of Jakarta's old town. Retrieved March 29, 2019, from <https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/23/fata-square-unsubtle-gentrification-jakarta-old-town>
- The Guardian. (2018). Double trouble? How big cities are gentrifying their neighbours. Retrieved March 30, 2019, from <https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/27/double-trouble-how-big-cities-are-gentrifying-their-neighbours>
- van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22, 112–128. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489>
- Waley, P. (2016). Speaking gentrification in the languages of the Global East. *Urban Studies*, 53(3), 615–625. <https://doi.org/10.1177%2F0042098015615726>
- Wang, S. W.-H. (2011). Commercial Gentrification and Entrepreneurial Governance in Shanghai: A Case Study of Taikang Road Creative Cluster. *Urban Policy and Research*, 29(4), 363–380. <https://doi.org/10.1080/08111146.2011.598226>
- Watkins, C. (2005). Representations of Space, Spatial Practices and Spaces of Representation: An Application of Lefebvre's Spatial Triad. *Culture and Organization*, 11(3), 209–220. <https://doi.org/10.1080/14759550500203318>
- Weinberg, M. S., Rubington, E., & Hammersmith, S. K. (Eds.). (1973). *Solution of Social Problems: Five Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Wu, Q., Edensor, T., & Cheng, J. (2018). Beyond Space: Spatial (Re)Production and Middle-Class Remaking Driven by Jiaoyufication in Nanjing City, China. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12568>
- Ye, C., Chen, M., Duan, J., & Yang, D. (2017). Uneven development, urbanization and production of space in the middle-scale region based on the case of Jiangsu province, China. *Habitat International*, 66, 106–116. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.05.013>